

RESPON MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA TAGAR #PERCUMALAPORPOLISI DI MEDIA SOSIAL TWITTER

Elis Syafaatin Nusroh¹⁾, Tira Fitriawardhani²⁾, Muhammad Fadeli³⁾

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Bhayangkara Surabaya

E-mail : elissyafa10@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of hashtags #PercumaLaporPolisi has become a case that has attracted a lot of attention from the Indonesian people in recent times. The high escalation of cases involving Police Institutions has an impact on reducing the level of public trust in these law enforcement institutions. So, this study aims to find out how community response towards Police Institutions on the phenomenon of hashtags #PercumaLaporPolisi on social media Twitter. The research method used in this study is Descriptive Qualitative, where data is obtained from a number of tweets of Twitter users who express their response in hashtags and are then analyzed. The study is based on the theory of the community response belonging to Steven M. Chafe. The results showed that there were three response groups on social media Twitter on the phenomenon of hashtags #PercumaLaporPolisi in 50 selected users, including the pro response group (supporting) as many as 8 people, the counter response (opposing) 41 people, and one neutral response person. The final results of the analysis showed that the counter group was the majority response with a ratio of 16% : 82% : 2%. It hints that the public's trust in the Police force has decreased significantly or even disappeared as evidenced by the act of rejection of the Police Institutions.

Keywords : Community Response, #PercumaLaporPolisi Hashtags, Twitter.

ABSTRAK

Fenomena tagar #PercumaLaporPolisi menjadi kasus yang banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Tingginya eskalasi kasus yang melibatkan Instansi Kepolisian berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap instansi penegak hukum tersebut. Sehingga, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap Instansi Kepolisian pada fenomena tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial Twitter. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, data diperoleh dari sejumlah cuitan pengguna Twitter yang menyampaikan responnya dalam tagar dan kemudian dianalisis. Penelitian ini didasarkan pada teori respon masyarakat milik Steven M. Chafe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok respon di media sosial Twitter mengenai fenomena tagar #PercumaLaporPolisi pada 50 pengguna yang terpilih, diantaranya kelompok respon pro (mendukung) sebanyak 8 orang, respon kontra (menentang) 41 orang, dan satu orang respon netral. Hasil akhir analisis menunjukkan kelompok kontra menjadi respon mayoritas dengan perbandingan 16% : 82% : 2%. Hal itu mengisyaratkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian telah menurun secara signifikan atau bahkan menghilang yang dibuktikan melalui tindakan penolakan terhadap instansi Kepolisian.

Kata Kunci : Respon Masyarakat, Tagar #PercumaLaporPolisi, Twitter.

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentunya mendukung penerapan aturan mengenai kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan berpendapat seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 (KomnasHAM, 2020). Salah satu wujud kebebasan dalam berpendapat tersebut yaitu kebebasan dalam menyuarakan tanggapan atau respon bagi masyarakat mengenai berbagai fenomena atau peristiwa yang terjadi baik pada aspek politik maupun non-politik. Umumnya respon masyarakat yang ditimbulkan dapat berupa perasaan suka atau tidak suka, maupun penerimaan atau penolakan terhadap fenomena atau peristiwa tersebut yang merupakan hasil dari pemahaman mereka.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, akses dalam menyampaikan respon juga kian terbuka diantaranya yaitu dapat melalui media massa dan media sosial (media baru). Hal itu dikarenakan kedua media tersebut dinilai memiliki pengaruh terhadap proses terbentuknya suatu reaksi masyarakat karena subjektifnya sangat bergantung pada penggunaannya sendiri. Media sosial khususnya Twitter tercatat seringkali dipergunakan sebagai mediator oleh pihak-pihak baik secara perorangan maupun organisasi atau kelompok untuk mengutarakan responnya mengenai isu-isu sosial dan politik hingga isu kemanusiaan yang sedang menjadi perbincangan. Hal itu dibuktikan dari banyaknya aktor politik yang memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian dan mempengaruhi pandangan publik guna memperoleh kemenangan dalam kompetisi politik.

Selain pada bidang politik, fenomena sosial yang dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi perbincangan masyarakat luas adalah fenomena tagar #PercumaLaporPolisi. Munculnya fenomena ini merupakan wujud dari konflik realistik yang saat ini sedang berlangsung di tengah masyarakat. Awal mula kemunculan tagar #PercumaLaporPolisi disebabkan oleh artikel kasus dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada bulan Oktober 2021 lalu. Hal itu dikarenakan upaya pelaporan yang telah dilakukan oleh ibu dari ketiga anak tersebut sejak Oktober 2019 lalu secara tiba-tiba proses penyelidikan kasusnya diberhentikan sepihak oleh Kepolisian Luwu Timur dengan dalih tidak adanya bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan perkara. Artikel tersebut pertama kali diangkat oleh salah satu media berita online “projectmultatuli.org” dengan judul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan”, yang kemudian menjadi semakin viral setelah diberitakan ulang oleh media nasional. Dari pemberitaan tersebut, masyarakat merasa geram dan kecewa karena menganggap instansi Kepolisian telah berpihak kepada terduga pelaku yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah setempat. Kemarahan masyarakat semakin menjadi-jadi ketika Polres Luwu Timur melalui akun resmi Instagramnya (@humasreslutim) menyatakan bahwa berita tersebut merupakan berita bohong atau *hoax*, yang mana dalam postingannya juga disertakan identitas dari ibu korban selaku pelapor serta hasil visum dari ketiga korban. Masyarakat berpendapat bahwa Kepolisian telah melakukan pelanggaran Undang-Undang dan Kode Etik Kepolisian karena telah mengungkap identitas ibu korban dan tidak memberikan perlindungan terhadap privasinya.

Situasi semakin memanas ketika pihak media projectmultatuli melalui akun Twitternya (@projectm_org) mengumumkan bahwa situsnya diretas oleh pihak yang tidak

diketahui sehingga tidak dapat diakses pasca memuat berita dugaan pemerkosaan tersebut. Selain itu, postingan di akun Instagramnya mengenai kasus tersebut juga mendadak dihilangkan yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membaca dan mengetahui kronologis kasus. Dari peristiwa itu, masyarakat menganggap bahwa Kepolisian berusaha untuk menutupi serta menghilangkan jejak kasus untuk melindungi terduga pelaku. Akibat dari peristiwa tersebut, masyarakat mulai melakukan berbagai upaya protes dan tuntutan melalui cuitan Twitter yang disertai dengan tagar #PercumaLaporPolisi. Masyarakat menganggap Kepolisian selaku instansi penegak hukum tidak menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dengan profesional. Dalam kurun waktu dua hari dari postingan pertama, tagar #PercumaLaporPolisi sudah digunakan hingga lebih dari 32 ribu kali oleh pengguna Twitter yang mengakibatkan tagar tersebut viral dan menjadi *trending topic* (Kompasiana.com, 2021).

Tidak hanya disebabkan oleh satu kasus saja, aksi protes masyarakat melalui tagar #PercumaLaporPolisi juga dilatarbelakangi oleh sejumlah kasus ketidakprofesionalan anggota Kepolisian lainnya, seperti kasus korban pemalakan oleh dua orang preman yang justru dijadikan tersangka, kasus seorang kakek penjaga kolam ikan yang menyabet pencuri sebagai bentuk aksi membela diri karena akan disetrum yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan hukuman penjara, hingga kasus pemerkosaan seorang mahasiswa oleh pacarnya yang merupakan anggota Kepolisian dan berujung pada aksi bunuh diri karena korban merasa tidak mendapatkan keadilan saat berupaya melaporkan pelaku. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada sejumlah kasus tersebut, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat yang berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap instansi Kepolisian. Dari banyaknya cuitan yang ada, masyarakat berasumsi bahwa anggota Kepolisian hanya akan menindaklanjuti suatu laporan apabila pelapor berasal dari kalangan atas atau orang yang memiliki jabatan tertentu, sebaliknya apabila pelapor merupakan kalangan biasa maka laporan tidak akan ditindaklanjuti. Selain itu, masyarakat juga menganggap Kepolisian hanya akan memproses suatu laporan apabila kasus tersebut viral dan menjadi perbincangan oleh masyarakat luas.

Aksi protes melalui tagar #PercumaLaporPolisi merupakan luapan dari tumpukan rasa kemarahan dan kekecewaan masyarakat terhadap instansi Kepolisian selaku lembaga penegak hukum di Indonesia yang dianggap inkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam fenomena tagar tersebut, berbagai macam cuitan yang diungkapkan masyarakat cenderung berkonotasi negatif, bahkan beberapa diantaranya berpotensi menjadi provokasi dan memicu terjadinya ujaran kebencian (*hate speech*). Hal ini lantaran masyarakat menganggap bahwa media sosial dapat secara bebas dijadikan sebagai media untuk mengkritik dan menyuarakan gerakan dalam mencari keadilan bagi siapapun yang tidak mendapatkannya. Sehingga, dari uraian peristiwa tersebutlah peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana respon masyarakat terhadap fenomena tagar #PercumaLaporPolisi yang terjadi di media sosial Twitter.

METODE PENELITIAN

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh deskripsi tentang respon masyarakat terhadap fenomena tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial Twitter. Penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk mempelajari isu-isu ataupun fenomena-fenomena sosial yang di dalamnya juga termasuk perilaku manusia yang berhubungan dengan isu sosial dan politik di media sosial dengan menciptakan gambaran yang secara menyeluruh dan kompleks, serta sesuai dengan yang terjadi (*real*). Sehingga, pendekatan kualitatif menjadi metode yang sangat tepat untuk mempermudah dalam menyesuaikan kondisi apabila berhadapan dengan realita publik. Adapun subjek pada penelitian ini adalah para pengguna (*users*) aktif media sosial Twitter yang mengutarakan responnya terkait kinerja instansi Kepolisian berdasarkan sejumlah kasus yang ditimbulkan oleh para oknum anggota Kepolisian. Terdapat dua jenis data pada penelitian ini, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa cuitan pengguna Twitter, sedangkan data kuantitatif berupa statistik pengguna Twitter yang menyuarakan responnya dalam tagar #PercumaLaporPolisi periode Oktober-Desember 2021.

Data dalam penelitian diperoleh melalui teknik observasi teks, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi teks yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung menggunakan pancaindera untuk memahami sejumlah cuitan pengguna Twitter. Dokumentasi dengan mengumpulkan foto yang berisikan cuitan dalam bentuk teks dan gambar. Serta studi pustaka yaitu pengumpulan data dari media berita dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang mencakup tiga tahapan diantaranya reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap informasi pada dasarnya akan selalu menimbulkan banyak penerimaan dan penafsiran yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh cara dan gaya bahasa dalam penyampaiannya. Seperti halnya pada sejumlah respon yang diungkapkan melalui cuitan di media sosial Twitter dalam fenomena tagar #PercumaLaporPolisi, dimana penyampaiannya menggunakan berbagai cara dan gaya bahasa yang berbeda-beda, sehingga secara umum cuitan-cuitan yang ada dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis respon, yang pertama yaitu respon yang mendukung (*pro*), kedua respon menentang (*kontra*), serta ketiga respon tidak memihak (*netral*). Dari ketiga kelompok cuitan tersebut juga menunjukkan bahwa respon yang diungkapkan masyarakat cenderung bersifat persuasif.

a. Respon pro masyarakat terhadap instansi Kepolisian

Dalam mengungkapkan responnya pada kelompok respon *pro*, selain tagar #PercumaLaporPolisi yang merupakan isu utama, terlihat dari beberapa cuitan masyarakat juga menyertakan tagar-tagar lain sebagai pelengkap yang dalam konteksnya memiliki arti positif seperti tagar #indonesiasatu dan #polisisesuai prosedur. Cuitan yang berisikan dukungan serta dorongan masyarakat terhadap Instansi Kepolisian untuk dapat segera melakukan pembenahan, baik pembenahan pada sumber

daya manusia (SDM) maupun pada sistem kerjanya mengartikan bahwa masyarakat masih meyakini Instansi Kepolisian mampu menjadi lebih baik lagi dikarenakan masyarakat menganggap Kepolisian merupakan instansi penegak hukum yang sudah seharusnya dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan slogan yang selama ini telah menjadi identitas dan wajah POLRI yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Selain itu dari sejumlah respon pro yang ada, salah satu masyarakat meyakini bahwa di dalam Instansi Kepolisian masih lebih banyak anggota Polisi yang profesional apabila dibandingkan dengan anggota Polisi yang tidak profesional. Namun akibat dari ketidakprofesionalan beberapa oknum anggota Polisi tersebut, maka citra dan isu yang berkembang di masyarakat hanyalah citra dan isu negatif saja, sehingga mengakibatkan timbulnya kesan buruk pada Instansi Kepolisian secara keseluruhan. Kemudian, adanya desakan dari masyarakat agar Kapolri selaku pimpinan tertinggi di Instansi Kepolisian untuk melakukan tindakan tegas kepada para oknum anggota Polisi yang mencoreng nama baik instansi demi mewujudkan terciptanya perbaikan baik secara internal maupun eksternal, sehingga berdampak pada perbaikan citra instansi. Dari dukungan dan harapan tersebut, mengartikan bahwa masyarakat masih memiliki rasa hormat terhadap Instansi Kepolisian dan percaya bahwa Kepolisian bukanlah instansi penegak hukum yang sangat buruk dan problematik.

b. Respon kontra masyarakat terhadap Instansi Kepolisian

Pada respon kontra, penyampaian respon oleh masyarakat dilakukan dengan menggunakan tulisan atau kata-kata serta gambar (*meme*). Sama halnya pada kelompok respon pro, cuitan pada kelompok respon kontra juga dilengkapi dengan tagar-tagar lain seperti tagar #PercumaAdaPolisi, #NoViralNoJustice, #ViralForJustice, hingga tagar #1Hari1Oknum untuk menyuarakan aksinya. Dalam menyampaikan responnya, masyarakat menggunakan berbagai gaya bahasa mulai dari sindiran, kiasan, penolakan atau pertentangan, melakukan perbandingan dengan instansi atau organisasi lain, hingga menggunakan *meme* atau gambar yang memiliki arti tertentu yang senada dengan reaksinya. Namun dari sejumlah respon kontra yang ada, terdapat kesamaan maksud dari setiap respon yang disampaikan meskipun menggunakan gaya bahasa yang berbeda-beda.

Secara umum, kesamaan maksud yang terdapat pada kelompok respon kontra ini yaitu anggapan bahwa Instansi Kepolisian dipenuhi oleh anggota-anggota yang nakal dan tidak profesional atau yang biasa disebut sebagai oknum, anggapan bahwa suatu laporan akan berhenti dan tidak akan ditindaklanjuti apabila sang pelapor tidak memiliki uang dan kekuasaan (*power*), serta anggapan bahwa anggota Kepolisian hanya akan memproses suatu laporan kasus apabila mendapat tekanan dari publik setelah kasus tersebut viral dan menjadi perbincangan oleh masyarakat luas. Berdasarkan pengakuan masyarakat dalam cuitannya, adanya respon-respon tersebut diungkapkan sesuai fakta yang ada dan merupakan pengalaman yang selama ini dialami baik oleh dirinya sendiri maupun orang terdekatnya.

Sejumlah cuitan lain juga mengungkapkan bahwa masyarakat lebih menyetujui fenomena “main hakim sendiri” yang saat ini banyak dilakukan. Hal ini lantaran proses hukum atau pemberian sanksi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dinilai tidak tegas dan tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku kriminalitas bahkan cenderung membela pelaku tersebut. Selain itu, masyarakat juga menganggap Kepolisian hanya menambah masalah dalam suatu laporan kasus dikarenakan akan membebani dan menyulitkan masyarakat, seperti meminta sejumlah uang agar kasus yang dialami dapat segera diproses dan ditindaklanjuti. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk memviralkan di sosial media kasus yang sedang dialaminya dibandingkan membuat laporan Kepolisian. Hal itu dikarenakan pada banyak kasus yang telah terjadi, netizen dianggap lebih cekatan dalam mengungkap atau menyelesaikan suatu kasus dibandingkan Kepolisian.

Aksi protes pada kelompok respon kontra yang ada, secara umumnya ditujukan kepada Instansi dan secara khususnya kepada Kapolri selaku pimpinan tertinggi sebagai bentuk kritik terhadap para anggotanya yang dianggap tidak dapat menjalankan kewenangannya secara bijak dan profesional. Protes tersebut terjadi akibat dari banyaknya kasus kontroversial yang melibatkan Instansi Kepolisian dan masyarakat beberapa waktu terakhir yang dinilai sangat merugikan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap Instansi Kepolisian merupakan instansi penegak hukum yang problematik dan hanya berpihak pada kelompok-kelompok yang menguntungkan mereka. Ketidaksukaan masyarakat terhadap Instansi Kepolisian yang merupakan akibat dari peristiwa tersebut, berdampak pada turun bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Instansi Kepolisian hingga adanya seruan untuk membubarkan instansi penegak hukum tersebut.

c. Respon netral masyarakat terhadap Instansi Kepolisian

Cuitan yang ada pada kelompok respon netral mengartikan bahwa sang pembuat cuitan tidak mendukung maupun menentang terhadap Instansi Kepolisian. Ia tidak terjebak pada sikap atau respon yang memihak ataupun menyalahkan. Dari pernyataan yang ada juga mengartikan bahwa terdapat masyarakat Indonesia yang pada dasarnya masih membutuhkan dan mempercayai Instansi Kepolisian sebagai instansi penegak hukum, khususnya para anggota Kepolisian yang kinerjanya profesional, bijak, dan taat pada pedoman maupun prosedur kerja, sebaliknya tidak untuk para oknum anggota yang kinerjanya buruk. Dikarenakan pernyataannya berisikan respon netral, maka cuitan tersebut tidak disertai harapan maupun sindiran dari masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pada ketiga kelompok respon masyarakat yang telah diuraikan di atas, banyaknya masyarakat yang ikutserta dalam menyampaikan gagasannya pada tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial Twitter mengartikan bahwa adanya upaya oleh masyarakat untuk terus menggunakan hak-haknya dalam kebebasan berpendapat melalui penyampaian respon atau tanggapan di sosial media. Seperti diketahui bersama, Instansi Kepolisian merupakan salah satu instansi pemerintahan yang selalu menjadi perhatian masyarakat Indonesia khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus dan isu negatif yang melibatkan instansi penegak hukum tersebut yang

kemudian berdampak pada citra instansi. Tentunya, hal itu berdampak pula terhadap pandangan masyarakat terhadap Instansi Kepolisian.

Dalam fenomena tagar #PercumaLaporPolisi yang terjadi di media sosial Twitter, dari keseluruhan respon yang dipilih peneliti yaitu sebanyak 50 pengguna Twitter, terdapat 8 pengguna yang cuitannya berisikan respon pro terhadap Instansi Kepolisian, 41 pengguna yang cuitannya berisikan respon kontra, sedangkan respon netral hanya terdapat satu pengguna saja, atau dengan perbandingan, 16% : 82% : 2%. Dari perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa respon mayoritas pengguna Twitter terhadap Instansi Kepolisian adalah kontra atau menentang. Pada respon kontra tersebut, selain bertujuan untuk mengkritik beberapa cuitan cenderung mengarah pada ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat berpotensi menjadi provokasi dan mempengaruhi pengguna lainnya.

Isi cuitan yang disampaikan oleh masyarakat secara garis besarnya mengisyaratkan makna kepercayaan maupun ketidakpercayaan mereka terhadap kinerja Instansi Kepolisian sebagai instansi penegak hukum di Indonesia pada fenomena tagar #PercumaLaporPolisi. Hal ini dapat terlihat dari kata-kata dan gaya bahasa yang digunakannya. Beberapa diantaranya secara terus terang mengungkapkan mengenai kepercayaan mereka terhadap Kepolisian, sedangkan beberapa lainnya menggunakan gaya bahasa seperti sindiran, kiasan, hingga penolakan. Selain itu, penggunaan kata-kata dan gaya bahasa yang secara emotif dapat menunjukkan apa yang masyarakat rasakan dan bagaimana sikapnya terhadap Kepolisian.

Selanjutnya, hasil analisis data menggunakan teknik kualitatif berdasarkan tiga jenis respon masyarakat menurut Steven M. Chafe yang telah dilakukan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kognitif

Berdasarkan respon-respon yang ada, beberapa diantaranya mengindikasikan respon yang termasuk ke dalam jenis kognitif. Pada jenis respon ini, diperlukannya pengetahuan masyarakat tentang fenomena tagar #PercumaLaporPolisi agar terjadi reaksi atau respon terkait fenomena tersebut. Pendapat masyarakat mengenai fenomena tagar tersebut menunjukkan bahwa mereka cukup memahami tentang apa yang sedang menjadi perbincangan.

2. Afektif

Pada sejumlah respon yang telah dianalisis juga memperlihatkan reaksi-reaksi yang menyangkut aspek emosional subjektif masyarakat terhadap fenomena tagar #PercumaLaporPolisi. Secara umum, jenis respon ini dapat dikaitkan dengan bagaimana sikap dan apa yang dirasakan masyarakat terhadap Kepolisian, seperti perasaan senang dan tidak senang, marah dan kecewa yang berakibat pada penolakan atau penerimaan masyarakat terhadap Kepolisian.

3. Konatif

Selain pada kognitif dan afektif, makna dari respon yang ada juga menunjukkan respon jenis konatif. Secara umum, respon konatif dapat menunjukkan bagaimana kecenderungan perilaku masyarakat dalam menanggapi fenomena tagar #PercumaLaporPolisi. Perilaku tersebut dapat didasari oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Pada jenis respon ini, terlihat dari

tingginya keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kritik dan protes terhadap Instansi Kepolisian. Sejumlah reaksi masyarakat juga mengartikan bahwa mereka berusaha untuk menghindari berurusan dengan Kepolisian yang dinilai tidak dapat bekerja dengan profesional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa respon publik terhadap fenomena tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial Twitter cenderung menunjukkan pada respon kontra. Hal itu dikarenakan banyaknya kasus yang melibatkan instansi Kepolisian dan ketidakprofesionalan para anggota Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, yang mengakibatkan kemarahan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi Kepolisian. Selanjutnya berdasarkan tiga aspek respon, adanya respon tersebut dikarenakan publik telah cukup memahami fenomena yang terjadi (kognitif), sehingga mampu menentukan sikap (afektif) yang kemudian memicu reaksi dan tindakan nyata terhadap fenomena (konatif).

Saran dari penelitian ini yaitu sangat diperlukannya Instansi Kepolisian dalam mengkaji cuitan tagar #PercumaLaporPolisi guna melakukan evaluasi dan perbaikan kerja kedepannya, serta melakukan peningkatan disiplin kerja dan pemberian sanksi tegas bagi para anggota Kepolisian yang melakukan indisipliner.

REFERENSI

- Afdillah, B. M. (2021). Respon Masyarakat Terhadap Program Kotaku Di Rw 08 Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Aktivisme Tagar dalam Kasus Pemerksaan 3 Anak di Luwu Timur, Mencari Keadilan Lewat Media Sosial - Kompasiana.com. (2021). Retrieved March 6, 2022, from <https://www.kompasiana.com/fery50973/615fafca06310e561e2f5bc2/mencari-keadilan-lewat-media-sosial>
- Annisa, S. D. (2017). Opini Publik Di Media Sosial Twitter Konflik Politik Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). 1–271.
- Deretan Kasus Kepolisian Picu Viralnya Tagar #PercumaLaporPolisi di Media Sosial. (2021). Retrieved March 6, 2022, from <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/16/070200081/deretan-kasus-kepolisian-picu-viralnya-tagar-percumalaporpolisi-di-media?page=all>
- Fabriana. (2020). RESPON MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT UNTUK KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN KOTA MATSUM II KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN.
- Fernanda, C. (2022). Respon Mahasiswa Pada *Co-Branding* Chatime x Minions Ditinjau Dari *Semantic Meaning Theory*.
- KomnasHAM. (2020). Standar Norma Dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. 34, 1–71.

- Maslachah, Y. D., Afifuddin, & Abidin, A. Z. (2019). Respon masyarakat desa terhadap pelayanan administrasi pemerintah desa (studi kasus di desa pandansari lor kecamatan jabung kabupaten malang). *Jurnal Respon Publik*, 13(2), 68–74.
- Ndoen, M. C. I. (2021). Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang.
- Oktafasari, I. A. (2013). Opini Publik di Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Opini Publik Kekerasan Anak di Sosial Media Twitter).
- Rini, B. D. S. (2021). ANALISIS STIGMA MASYARAKAT TERHADAP AKUN BUZZER POLITIK (Studi Kasus: Tagar# JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial Twitter).
- Tagar “percuma lapor Polisi” trending, ini asal usul sedih di baliknya. (2021). Retrieved March 6, 2022, from <https://www.hops.id/trending/pr-2942115385/tagar-percuma-lapor-polisi-trending-ini-asal-usul-sedih-di-baliknya>
- Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan. (2021). Retrieved September 25, 2022, from <https://projectmultatuli.org/kasus-pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemerksa-dan-menghentikan-penyelidikan/>